



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 40 (empat puluh)
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani
Hari, Tanggal	: Rabu, 29 Juni 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E, M.Si/Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Lt .1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022.
Hadir	: 1. 33 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani pada pukul 10.58 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 29 Juni 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan terkait pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2021 serta mendorong Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perhutani beserta anggota holding untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inovasi-inovasi usaha termasuk transformasi teknologi dan digital serta pemanfaatan data untuk tujuan yang bersifat prediktif sehingga mampu mendukung

- peningkatan produktivitas usaha dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan.
- b. meningkatkan peran dan fungsi dalam mendukung kelestarian hutan nasional termasuk kontribusi pada perekonomian setempat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM setempat dalam kegiatan usaha perusahaan.
 - c. meningkatkan sinergi dengan BUMN-BUMN di bidang perkebunan dan pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara Group dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan kehutanan nasional serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.
 - d. melakukan percepatan intergrasi bisnis dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan.
3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh Perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
 4. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk menyusun strategi mitigasi resiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perusahaan.
 5. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota holding untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya *illegal logging*, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.
 6. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.52 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PERUM PERHUTANI**

Ttd.

WAHYU KUNCORO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

ARIA BIMA

A-189